



Sehari usai Dilantik, Pemkot Berikan Jawaban di PTUN

Singgih Dalam Gugatan IMB Hotel Swiss Bell

Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Singgih Raharjo ke depan. Selain menjaga tahun politik dan menegakkan netralitas ASN sebagaimana pesan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, Singgih juga menghadapi persoalan lain yang tidak kalah seriusnya. Masalah tersebut berupa gugatan hukum terkait perizinan hotel peninggalan rezim sebelumnya Wali Kota Haryadi Suyuti (HS).

IN SIGHT

Pj wali kota bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Jogja menjadi tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Gugatan diajukan Tim Pembela Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat yang menuntut pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell.

► Bocor Singgih... Hal 7

SAMBUTAN HB X

Pelantikan Pj wali kota dan Pj bupati Kulonprogo:

- Sebagai upaya mendukung pencapaian visi Gubernur DIJ, Mewujudkan Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Kondusivitas tahun politik tak hanya saat masa kampanye. Tapi juga masa pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten serta kota. Juga masa pemilihan presiden.



PEJABAT BARU: Gubernur DIJ Hamengku Buwono X melantik Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Singgih Raharjo dan Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Bangsal Kepatihan, Jogja, kemarin (22/5).



SELAMAT YA: Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Singgih Raharjo (kiri) dan Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti (ketiga kiri) mendapat ucapan selamat dari tamu undangan se usai dilantik oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Jogja, kemarin (22/5).

Cegah Penyelewengan, Sekprov Petakan Pemanfaatan TKD

PENGLOLAAN tanah kas desa (TKD) tak luput dari perhatian Beny Suharsono. Birokrat yang baru saja dilantik menjadi Sekprov DIJ itu mengaku tengah menyusun peta penanganan pemanfaatan TKD. "Ini agar tak terjadi lagi penyelewengan," tegas Beny di Kompleks Kepatihan, kemarin (22/5). Dikatakan, pemetaan itu sedang berjalan. Dia berharap langkah tersebut agar Pemprov DIJ mendapatkan peta penanganan yang lebih baik. "Intinya pemanfaatan TKD sepenuhnya untuk kepentingan, kemakmuran masyarakat di desa," tambahnya.

► Bocor Cegah... Hal 7

NJAWANI: Sekprov DIJ Beny Suharsono memberikan keterangan pers se usai dilantik oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Jogja, kemarin (22/5).



Singgih Dalami Gugatan IMB Hotel Swiss Bell

Sambungan dari hal 1

"Saya akan dalami terlebih dahulu seperti apa," ujar Singgih usai acara pelantikan di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (22/5).

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengaku perlu mempelajari lebih lanjut perkara tersebut. Karena itu, dirinya berjanji secepatnya berkoordinasi dengan internal Pemkot Jogja. Tak hanya soal gugatan IMB Hotel Swiss Bell, Singgih juga akan membahas masalah lainnya. "Kami lakukan koordinasi secara internal tidak hanya tentang itu, tapi hal-hal lain," tegas birokrat yang dikenal hobi gores ini.

Sesuai agenda di PTUN Yogyakarta, hari ini Selasa (23/5) merupakan giliran Pemkot Jogja menyampaikan jawaban atas gugatan yang telah diajukan penggugat. Jawaban dari tergugat satu Pj wali kota Jogja, tergugat dua kepala dinas PMPTSP Kota Jogja dan tergugat intervensi Tjhin Tjong Giong.

Kedudukan Tjong Giong selaku direktur PT Matratama Graha Mulia sebagai pemegang IMB

Hotel Swiss Bell Jalan Jenderal Soedirman 69 Jogja. Agenda jawaban di PTUN itu terjadi persis satu hari usai kepala Dinas Pariwisata DIJ itu dilantik sebagai Pj wali kota.

Singgih mengatakan, tahun politik harus menjadi perhatian. Ini dalam rangka menciptakan pesta demokrasi yang aman, nyaman. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu dilakukan.

Tujuannya sekali lagi demi menjaga kondusivitas pemilu. Dua langkah itu akan dilakukan dengan melibatkan partai politik, pengawas pemilu, penyelenggara pemilu hingga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Jogja. Masalah tersebut juga ditekankan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Baik saat memberikan sambutan pelantikan maupun mengundangi Singgih ke ruang kerja gubernur.

Singgih dipanggil bersama Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti. Pertemuan berlangsung usai pelantikan. Sekitar satu jam Singgih dan Ni Made mendapatkan wejangan khusus dari raja Keraton Jogja

itu. Ikut mendampingi dalam pertemuan itu Sekprov DIJ Beny Suharsono.

"Ini menjadi komitmen bersama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan lancar dan kondusif," kata pria yang tinggal di Celeban, Umbulharjo, Jogja ini.

Singgih juga menyoroti peningkatan pelayanan publik. Sasarannya semua sektor pemerintahan. Termasuk peningkatan kesejahteraan warga Jogja. "Kemudian bagaimana kita mengawal pengentasan kemiskinan dan stunting juga menjadi perhatian," imbuhnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pj wali kota dan Pj bupati Kulonprogo diadakan usai gubernur mengangkat Beny Suharsono sebagai Sekprov DIJ. Jalannya acara semua dilangsungkan di Bangsal Kepatihan. Selain kepala OPD di lingkungan Pemprov, tampak ikut menghadiri kedua acara itu Ketua DPRD DIJ Nuryadi, Kepala Kejati DIJ Ponco Hartanto, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo dan Sekda Sleman Harda Kiswaya.

HB X dalam sambutannya mengungkapkan, pelantikan Pj

wali kota dan Pj bupati Kulonprogo bertujuan mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan. Di samping itu, sebagai upaya mendukung pencapaian visi Gubernur DIJ. Mewujudkan Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Soal kondusivitas tahun politik tak hanya saat masa kampanye. Tapi juga masa pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten serta kota. Juga masa pemilihan presiden.

Raja Keraton ini meyakini Singgih dan Ni Made dapat menunaikan tugas dengan baik. Keduanya cukup mengenal peta sosio-kultural kemasyarakatan Kulonprogo dan Kota Jogja.

Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti berkomitmen menjaga kondusivitas pemilu dan menjaga netralitas ASN. "Kami harus menjaga tidak memihak. Istilahnya harus menjaga kondusivitas sampai Pemilu 2024," tambahnya. (wia/lan/tom/kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005